

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA JATI KULON
KABUPATEN KUDUS**

As Sabilla Haqqi Mantovani, Dra. Maesaroh, M.Si

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment is a process of improving the ability and attitude of community self-reliance, in which the previously powerless communities become empowered. Community empowerment is being intensively implemented in villages in Indonesia, such as in Jati Kulon Village, Kudus Regency. The empowerment form in Jati Kulon Village of Kudus Regency is community empowerment through waste management. Waste management in question is to recycle organic waste to be used as various kinds of handicrafts that have a high enough selling value. The government of Jati Kulon Village, Kudus Regency also created a Waste Management Community namely “Paguyuban Pengelolaan Sampah” to transport the garbage in the village area. This research uses descriptive qualitative research method that describes detailed description about observed phenomenon. Community empowerment through waste management in the village of Desa Jati Kulon, Kudus Regency is explained by looking at 3 (three) points in every community empowerment called “3 Bina” namely Human Train, Business Development and Environment Development. Support and good coordination from community, stakeholders, village institutions, and related parties will realize successful community empowerment and can prosper the community.

Keywords: Community Empowerment, Waste Management, Recycling Craft

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang terjadi di Indonesia selalu diiringi dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin pesat. Akibat dari bertambahnya jumlah penduduk tersebut menyebabkan pola konsumsi masyarakat semakin bertambah pula. Bertambahnya pola konsumsi masyarakat tersebut menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah di negara berkembang seperti Indonesia walaupun di anggap remeh oleh sebagian masyarakat, namun sesungguhnya sampah merupakan permasalahan kompleks dan harus serius untuk diselesaikan, tak terkecuali permasalahan sampah desa-desa di Indonesia.

Pembangunan desa merupakan salah satu cara pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan mengandalkan berbagai potensi yang dimiliki desa tersebut. Seiring dengan perkembangan jaman, kini wilayah pedesaan

mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut dilakukan dalam salah satu cara yaitu pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan adanya peran serta masyarakat salah satunya dalam pengelolaan sampah yang ada di desa-desa, salah satunya seperti di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus. Pemberdayaan masyarakat di Desa Jati Kulon sudah dijalankan cukup baik seperti Pemerintah Desa Jati Kulon membentuk sebuah Paguyuban Pengelolaan Sampah di mana Desa Jati Kulon berdiri secara mandiri dalam hal persampahan yaitu mulai dari pengangkutan hingga pengelolaannya.

Selain itu, di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus juga ada pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang sampah yang dijalankan oleh ibu-ibu PKK di setiap RW. Pengelolaan sampah melalui kegiatan daur ulang sampah dalam upaya mengatasi tumpukan sampah yang semakin bertambah dan untuk memanfaatkan kembali sampah-sampah anorganik agar memiliki nilai ekonomis.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Seperti yang sudah terjadi di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus, ibu-ibu PKK memanfaatkan sampah untuk didaur ulang dan dijadikan berbagai macam kreasi kerajinan seperti tas, dompet, bros, tempat sampah, bunga, gaun, serta hiasan kerajinan lainnya.

Namun dalam perjalanannya, masih ada sebagian masyarakat yang memiliki waktu luang yang cukup banyak namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga hanya monoton yakni mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Padahal dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah ini ibu-ibu dapat menjadikannya sebagai peluang untuk mendapatkan pendapatan. Hal ini terjadi karena belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkan sampah-sampah

rumah tangganya sebagai aset untuk memberdayakan masyarakat.

Permasalahan sampah erat sekali kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, sebab masyarakatlah yang merupakan sumber sampah itu sendiri. Mengatasi permasalahan sampah dari sumbernya akan menjadikan permasalahan sampah menjadi lebih sederhana. Di tengah kesulitan dan keterbatasan pemerintah dalam hal penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia untuk pengelolaan sampah maka peran masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi aspek yang sangat penting.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus?
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus dan bisa menjadi modal desa lain atas keberhasilan Desa Jati Kulon dalam hal pengelolaan sampah.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Robert T Golembiewski (dalam Pasolong, 2014:28) menganggap bahwa paradigma adalah standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokus. Lokus yang dimaksud adalah tempat/ letak dari kelembagaan administrasi publik. Sedangkan fokus adalah

sesuatu yang dikhususkan bagi atau dari administrasi publik.

Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014:28) mengemukakan 5 (lima) paradigma administrasi publik sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1900-1926)
2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)
5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970-sekarang)

2. Manajemen Publik

Manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem Administrasi Publik karena manajemen adalah “Penggerak Administrasi Publik”. Manajemen adalah suatu sistem, karena itulah jika salah satu sub sistemnya kurang berperan dengan baik, akan terjadi mismanajemen (keliru kelola).

Pada dasarnya manajemen publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Overman (dalam

Pasolong, 2014:83) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain.

3. Manajemen Lingkungan

Dalam membangun dan mengembangkan tingkat pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tercipta keseimbangan ekosistem, dibutuhkan berbagai komponen manajemen agar tercipta sistem kerja terjamin.

Rangkaian bentuk fungsi-fungsi dari manajemen lingkungan meliputi:

- a. perencanaan (planning); tahapan didalamnya seperti analisis lingkungan, perumusan misi dan sasaran stratejik, analisis dan pemilihan strategi, implementasi strategi, pengendalian dan evaluasi strategi
- b. pengorganisasian (organizing); Menurut Sudjana (dalam Karim,

2012:64) dalam pengorganisasian terdapat pembagian kekuasaan, wewenang dan peranan diantara orang yang tergabung dalam organisasi, pengorganisasian menekankan pentingnya tingkah laku orang-orang yang diberi peranan dan tugas.

- c. penggerakan (motivating); upaya untuk menggerakkan (memotivasi) seseorang atau kelompok orang yang dipimpin dengan menumbuhkan dorongan atau *motive* dalam diri orang-orang yang dipimpin untuk melakukan tugas atau kegiatan yang diberikan (Sudjana (dalam Karim, 2012:69)).
- d. pembinaan (conforming); Sasaran pembinaan lebih menekankan pada meningkatnya tingkat kesadaran anggota dalam merealisasikan tujuan dari proses manajemen lingkungan.
- e. penilaian (evaluating); Penilaian mempunyai kaitan erat dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain.

4. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*power alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak saat itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan.

b. Pembangunan berbasis masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*).

Dalam pemahaman ini, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing,

serta menciptakan iklim yang menunjang.

c. Pemberdayaan sebagai proses

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).

d. Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sumadyo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:113) merumuskan tiga pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebutnya Tri Bina, yaitu:

1. **Bina Manusia**, yang termasuk didalamnya:

- a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan;
- b. Pengembangan Kapasitas Entitas/Kelembagaan, yang meliputi:
 - Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi;
 - Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi;
 - Proses organisasi atau pengelolaan organisasi;
 - Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya;
 - Interaksi antar individu di dalam organisasi;
 - Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain
- c. Pengembangan Kapasitas Sistem (Jejaring), yang meliputi:
 - Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama;
 - Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

2. Bina Usaha

Mencakup banyak hal seperti:

- a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk;
- b. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan;
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal;
- d. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi;
- e. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

3. Bina Lingkungan

Selain lingkungan fisik yang utamanya menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Di dalamnya termasuk tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan fisik.

- e. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Lippit (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:123) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam 7 (tujuh) kegiatan pokok yaitu:

- a. Penyadaran
- b. Menunjukkan adanya masalah
- c. Membantu pemecahan masalah
- d. Menunjukkan pentingnya perubahan
- e. Melakukan pengujian dan demonstrasi
- f. Memproduksi dan publikasi informasi

f. Pengelolaan Sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

1. Pengurangan Sampah, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah
 - b. daur ulang sampah
 - c. pemanfaatan kembali sampah tersebut
2. Penanganan Sampah, meliputi:
 - a. Pemilahan
 - b. Pengumpulan
 - c. Pengangkutan
 - d. Pengolahan
 - e. Pemrosesan akhir sampah

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Jati

Kulon Kabupaten Kudus mengambil tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus”.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memilih informan. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan 3 macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis yang digunakan meliputi reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Kemudian untuk pemeriksaan keabsahan data digunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk mengecek atau membandingkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus

Mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus akan dijelaskan

dengan melihat 3 (tiga) pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebut Tri Bina yakni Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.

1) Bina Manusia

a. Pengembangan Kapasitas Individu

- a) Pengembangan Kapasitas Kepribadian: dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku pemberdayaan masyarakat namun belum merata. Wujud pendidikan dan pelatihan tersebut berupa melatih masyarakat khususnya kaum adam untuk membuat kerajinan tempat sampah dengan memanfaatkan sampah. Untuk ibu-ibu pelaku daur ulang sampah justru diberikan pelatihan oleh salah satu warga dari RW 2 melalui sosialisasi atau mengikuti pelatihan dari dinas-dinas terkait seperti Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian

Koperasi & UKM Kabupaten Kudus.

- b) Pengembangan Kapasitas di Dunia Kerja: dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus pengembangannya yaitu memperluas atau menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dalam perkembangannya kegiatan pemberdayaan ini dijadikan masyarakat sebagai peluang untuk berbisnis kerajinan daur ulang sampah.

- c) Pengembangan Keprofesionalan: Dalam pengembangannya dilakukan cara pelatihan, studi banding, dan mengikuti atau hanya melihat expo daur ulang sampah di dalam maupun luar kota.

b. Pengembangan Kapasitas Entitas/Kelembagaan

- a) Kejelasan visi, misi dan budaya organisasi: visi, misi

Pemerintah Desa Jati Kulon sudah sesuai dengan visi, misi Kabupaten Kudus terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus.

- b) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi: dalam perjalanannya struktur organisasi sudah dibentuk baik untuk Paguyuban Pengelolaan Sampah maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang sampah. Kemudian, kompetensi yang dimiliki masyarakat sudah cukup baik yaitu dengan membuat berbagai macam kreasi kerajinan daur ulang. Sedangkan untuk strategi pengembangan kegiatan ini, Pemerintah Desa Jati Kulon berencana akan memaksimalkan kegiatan pengelolaan sampah jika sebelumnya hanya sampah anorganik yang diolah,

nantinya sampah organik juga akan diolah menjadi pupuk.

- c) Proses organisasi atau pengelolaan organisasi: proses atau pengelolaan kegiatan ini sendiri yaitu masyarakat selalu memperhatikan bahan-bahan utama sebelum diolah pasti di cuci terlebih dahulu guna menghasilkan produk yang berkualitas.
- d) Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya: pengembangannya yaitu mencari terobosan dan ide-ide baru melalui internet. Referensi biasanya melihat dari sesuatu yang sedang tren misalkan melihat tas-tas brended kemudian masyarakat mencoba untuk membuatnya.
- e) Interaksi antar individu di dalam organisasi: antara individu satu dengan individu lainnya sudah mampu berinteraksi cukup baik. Dimana satu dengan yang lainnya mampu untuk

bekerjasama, saling membantu, dan saling mendukung dengan RW lainnya.

f) Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain: interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan pemangku kepentingan sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rencana di tahun 2018 semua hal tentang sampah akan di BUMDes kan.

c. Pengembangan Kapasitas Sistem (Jejaring)

a) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama: interaksi antara RW satu dengan RW lainnya berjalan dengan baik dan bisa untuk diajak bekerjasama. Hal ini dibuktikan ketika ada lomba desa tingkat kecamatan dengan dibentuk tim masing-masing RW diambil perwakilan satu, dengan ini dapat mempererat tali

silaturahmi dan menjaga kekompakan.

b) Pengembangan interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem: dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus interaksi dengan entitas (organisasi) di luar sistem bisa dikatakan cukup baik. Pemerintah Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi & UMKM Kabupaten Kudus.

2) Bina Usaha

a. Peningkatan pengetahuan teknis

a) Meningkatkan produktivitas: dilakukan dengan cara pelatihan dan terus berinovasi. Namun terkendala pada bahan utamanya yaitu sampah yang tidak selalu ada.

- b) Perbaikan mutu dan nilai tambah produk: dilakukan dengan berinovasi dengan melihat referensi dari berbagai sumber. Namun terkendala di kemampuan SDM yang terbatas.
- b. Perbaikan manajemen
- a) Meningkatkan efisiensi usaha: dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan SDM, memperbaiki mutu produk, terus berinovasi, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik tidak yang asal-asalan supaya bisa bertahan lama dan tidak cepat rusak.
- b) Pengembangan jejaring kemitraan: selain dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi & UMKM Kabupaten Kudus jejaring kemitraan yang dilakukan yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan
- Pelaku pemberdayaan sudah menerapkan prinsip ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) dalam kegiatan daur ulang sampah. Masyarakat selalu mencari referensi dari internet, mengamati barang-barang yang sedang booming, kemudian masyarakat mencoba membuat untuk produk daur ulang sampah.
- d. Peningkatan aksesibilitas
- Dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan aksesibilitas mencakup modal, pasar, dan informasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat saat mengawali kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menggunakan modal pribadi.
- Untuk pemasarannya melalui berbagai macam cara, seperti pameran expo, di balai desa ketika ada studi banding, melalui online seperti sosial media, serta melalui website Dinas Tenaga Kerja

Perindustrian Koperasi & UMKM Kabupaten Kudus.

e. Advokasi kebijakan

Advokasi dan pemberdayaan masyarakat memang berjalan seiringan. Tanpa ada advokasi yang jelas, maka pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai. Pemerintah Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus sebagai fasilitator berupaya membantu dalam hal pemasaran. Dimana sering diadakan lomba desa dengan daur ulang sampah untuk masing-masing RW.

Selain itu, Pemerintah Desa Jati Kulon juga sering mengajak masyarakat untuk mengikuti pameran dan expo di dalam maupun luar kota.

3) Bina Lingkungan

Bina lingkungan berhubungan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial masyarakat atas kegiatan pemberdayaan ini.

Bentuk tanggung jawab lingkungan dan sosial masyarakat seperti ketika membuat produk dan masih ada sisa kecil-kecil

masyarakat membuangnya ke tempat sampah jadi tidak dibuang sembarangan dan mengotori lingkungan. Namun, ada pula masyarakat yang mengerjakan suatu produk sebisa mungkin tidak meninggalkan sisa. Sisa-sisa kecil yang masih bisa dimanfaatkan akan dipergunakan kembali.

2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus.

a. Faktor Pendorong

- a) Keinginan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan yang semakin berubah

Hal yang mendasari masyarakat untuk mau berubah dengan mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon disebabkan oleh mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan dengan mengikuti kegiatan ini jadi memiliki

penghasilan, dari yang biasanya tidak ada kegiatan setelah mengikuti kegiatan ini jadi memiliki kegiatan, serta masyarakat merasakan manfaat yang baik untuk kehidupannya.

- b) Ditemukannya inovasi yang memberikan peluang

Dengan mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Desa Jati Kulon, masyarakat menjadikan kegiatan tersebut sebagai peluang untuk berwirausaha untuk mendapatkan pendapatan tambahan.

b. Faktor Penghambat

- a) Pekerjaan

Berhubungan dengan waktu yang dimiliki. Dimana kegiatan ini masyarakat ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama dan ada pula yang menjadikannya sebagai sampingan.

Bagi yang menjadikannya sebagai

pekerjaan utama tentunya akan sangat menguntungkan bagi dirinya dan maksimal dalam menjalankannya. Sedangkan untuk masyarakat yang menjadikan kegiatan ini sebagai pekerjaan sampingan, tentu tidak akan semaksimal masyarakat yang menjadikan kegiatan ini sebagai pekerjaan utama.

- b) Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas

Kemampuan SDM yang masih terbatas, seperti masyarakat yang sudah diberikan pelatihan berkali-kali tetapi masih belum bisa juga, belum ahli dalam menjahit tas yang rumit dimana masyarakat yang sudah bisa menjahit jumlahnya juga masih sedikit yaitu hanya 3 (tiga) orang.

- c) Bahan utama yang tidak selalu ada

Bahan baku yang digunakan tidak selalu ada mengingat bahan tersebut adalah sampah yang

jumlahnya terbatas khususnya sampah anorganik. Sampah-sampah anorganik seperti bungkus kopi, bungkus deterjen, dan bungkus plastik lainnya tidak selalu ada padahal permintaan paling banyak ada pada hal hal tersebut.

PENUTUP

a. Kesimpulan

a) Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus

1. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Jati Kulon belum merata
2. Kegiatan ini membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat
3. Walaupun pendidikan dan pelatihan belum bisa merata, Pemerintah Desa Jati Kulon mengajak masyarakat untuk studi banding ke luar kota terkait pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah

4. Desa Jati Kulon sudah mandiri dalam hal pengangkutan sampah hingga pengelolaannya

5. Masyarakat terus berinovasi dan melihat referensi dari berbagai sumber guna menciptakan produk yang baru

6. masyarakat Desa Jati Kulon sudah cukup memiliki kesadaran akan tanggungjawab sosial dan lingkungan atas kegiatan pemberdayaan masyarakat

b) Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus

1. Faktor Pendorong

- 1) Keinginan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan yang semakin berubah
- 2) Ditemukannya inovasi yang memberikan peluang

2. Faktor Penghambat

- 1) Pekerjaan

- 2) Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas
- 3) Bahan utama yang tidak selalu ada

b. Saran

1. Perlunya pendidikan dan pelatihan secara merata kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitasnya.
2. Untuk pemasaran produknya bisa lebih diperluas lagi, bisa dipasarkan melalui marketplace seperti tokopedia, bukalapak, elevenia, shopee dan masih banyak lagi.
3. Pemerintah Desa Jati Kulon perlu membuat sebuah galeri untuk produk-produk daur ulang sampah ini.
4. Kerjasama yang baik harus terus dilaksanakan baik sesama pelaku pemberdayaan maupun pelaku pemberdayaan dengan stakeholders.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Pasolong, Harbani. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, dan Soebiato. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Sunyoto. (2012). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Soetomo. (2011). Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah muncul antitesisnya?). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ibrahim, Amin. (2013). Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya. Bandung: Refika Aditama.
- Karim, Abdul. (2012). Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Priansa, Donni Juni. (2014). Perencanaan & Pengembangan SDM. Bandung: Alfabeta.

b. Jurnal

Sutiyadi, Muhammad Ilham. (2015). Efektivitas Pengelolaan Sampah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, 4 (3). *Governance Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*. (diakses pada hari Minggu 25 Desember 2016 pukul:15.00)

Fadhilah, Arief dkk. (2011). Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 11 (2). Modul. (diakses pada hari Minggu 25 Desember 2016 pukul: 15.00)

Affandy, Nur Azizah dkk. (2015). Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah komprehensif menuju Zero Waste. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015 Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. (diakses pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 pukul:15.00)

Fahriani, Nisfi, dkk. (2015). Pemberdayaan Masyarakat

melalui Pengelolaan Sampah di Desa Wisata Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, 3 (2). *Prosiding KS: Riset & PKM*. (diakses pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 pukul: 11.37)

Prianto, Ragil Agus. (2011). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang. skripsi Universitas Negeri Semarang. (diakses pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 pukul: 11.37)

Ratnasari, Jenivia Dwi, dkk (2011). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*. Vol.1, No.3, h. 103-110. (diakses pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 pukul: 23.17)

c. Internet

<https://www.scribd.com/doc/201387282/Jurnal-Analysis-Penanganan-Sampah-Di-Objek-Wisata-Pantai-Pangandaran-Kabupaten-Ciamis> (diakses pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016)

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/viewFile/912/852> (diakses pada hari Senin 7 November 2016)

<http://www.kuduskab.go.id/profile.php> (diakses pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 pukul 19.00)

<http://dinascipkataru-kudus.com/> (diakses pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016)

<http://ilmubagi.blogspot.co.id/2010/11/paradigma-ilmu-positivisme.html> (diakses pada hari Rabu, 25 Oktober 2017 pukul 10.00)

<https://kuduskab.bps.go.id/publication/2018/01/03/c6537136b82e1906a9a40607/kecamatan-jati-dalam-angka-2017.html> (diakses pada hari Kamis, 11 Januari 2018 pukul 16.00)

www.kuduskab.go.id (diakses pada hari Selasa, 22 Mei 2018 pukul 13.00)

f. Regulasi

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus

Keputusan Kepala Desa Jatikulon Nomor : 660.2 / 11 / 2017 tentang Penetapan Paguyuban

Pengelolaan Sampah di Desa
Jatikulon Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan
Sosial

Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat
melalui Gerakan
Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga di
Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembangunan Desa